

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR DI  
KECAMATAN MANGGALA TAHUN 2020**



**MUH. RAFLY**

**E041181504**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR DI**  
**KECAMATAN MANGGALA TAHUN 2020**

**MUH. RAFLY**

**E041181504**



**SKRIPSI**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Makassar Di Kecamatan Manggala Tahun 2020" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Maret 2024

  
METERAI  
TEMPEL  
9BAKX816747344  
**MUH. RAFLY**  
E041181504

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR DI  
KECAMATAN MANGGALA TAHUN 2020**

Di susun oleh :

**MUH. RAFLY  
E041181504**

Dinyatakan memenuhi syarat dan siap diujikan-kan  
Pada tanggal : ..14.Maret.2024...

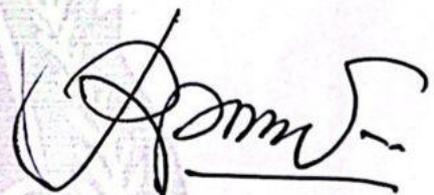
**Menyetujui :**

**Pembimbing I**



**Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si**  
**NIP. 197308131998022001**

**Pembimbing II**



**Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si**  
**NIP. 196805082019015001**

**Mengetahui :**

**Ketua Departemen Ilmu Politik**



**Drs. H.A. Yakub, M.Si. P. hD**  
**NIP. 19621231 199003 1023**

## ABSTRAK

**Muh. Rafly. Nim E041181504. Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Makassar Di Kecamatan Manggala Tahun 2020.** Di Bawah Bimbingan Ibu Gustiana A. Kambo Dan Bapak Muh. Imran.

Tahun 2020 kota Makassar menjadi salah satu pelaksana Pilkada Serentak. Setelah kolom kosong memenangkan Pilwalkot kota Makassar tahun 2018. Tahun 2020 kota Makassar kembali menggelar Pilwali yang diikuti oleh 4 pasang calon. Pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020 ini terdapat dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Walikota Makassar. Pasangan calon tersebut dilaporkan oleh tim lawan karena tersebarnya sebuah video yang berisikan warga sedang membawa beras dengan gambar salah satu pasangan calon Walikota Makassar sehingga hal ini diduga sebagai *money politic*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam pemilihan Walikota Makassar di kecamatan Manggala pada tahun 2020. Penulis melakukan penelitian dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan bagaimana praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam pemilihan Walikota Makassar di kecamatan Manggala pada tahun 2020.

Penelitian ini menunjukkan bentuk praktik *money politic* di Kecamatan Manggala kota Makassar pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota tahun 2020 benar terjadi. Bentuk praktik *money politic* itu berupa. Pertama, serangan fajar berupa pembagian uang tunai dengan besaran bervariasi antar Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 400.000. Kedua, pembagian sembako kepada kalangan ibu-ibu, dan pembuatan dan perbaikan fasilitas umum seperti pembuatan lapangan olahraga seperti lapangan badminton dan takraw serta perbaikan pos kamling.

**Kata Kunci :** Money Politik, Serangan Fajar, Pemilihan Walikota, Makassar

## ABSTRACT

**Muh. Rafly. Nim E041181504. Money Politics in the Makassar Mayoral Election in Manggala District in 2020.** Under the Guidance of Mrs. Gustiana A. Kambo and Mr. Muh. Imran.

In 2020 Makassar city became one of the implementers of the Simultaneous Regional Elections. After the empty column won the 2018 Makassar city Pilwalkot. In 2020 the city of Makassar held another Pilwali which was attended by 4 pairs of candidates. In the 2020 Makassar mayoral election, there were allegations of money politics practices carried out by one of the Makassar mayoral candidate pairs. The candidate pair was reported by the opposing team because of the spread of a video containing residents carrying rice with a picture of one of the Makassar Mayor candidate pairs so that this was suspected of being money politics.

This study aims to analyze the practice of money politics carried out by candidate pairs for Mayor and Deputy Mayor of Makassar in the Makassar Mayoral election in Manggala sub-district in 2020. The author conducted research on a qualitative research basis. Data collection was carried out by interviewing key informants who were considered to be able to explain how the practice of money politics was carried out by the candidate pairs for Mayor and Deputy Mayor of Makassar in the Makassar Mayor election in Manggala sub-district in 2020.

This research shows that the form of money politics practices in Manggala Subdistrict, Makassar City in the 2020 Mayor and Deputy Mayor elections is true. The forms of money politics practices are. First, dawn attacks in the form of cash distribution with amounts varying between Rp. 200,000 to Rp. 400,000. Second, the distribution of basic necessities to mothers, and the creation and improvement of public facilities such as the construction of sports fields such as badminton and takraw courts and the repair of kamling posts.

**Keywords:** *Money Politics, Dawn Attack, Mayor Election, Makassar*

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala berkah rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Makassar Di Kecamatan Manggala Tahun 2020”**. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama pembuatan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kendala dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang telah menemani perjalanan penulis, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, izinkan penulis, dalam pendahuluan ini, untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang dikirimkan Tuhan kepada penulis, yaitu kedua orang tua tercinta, Bapak **Kaharuddin** dan Ibu **Marliana Salam**, yang menyayangi juga selalu berkorban dan menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak dan mamaku tercinta dan tersayang, doa kalian yang tiada hentinya selalu terpanjatkan untuk penulis terus berkarya dan melangkah dalam menuntut ilmu sejauh ini. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu **Gustiana A Kambo**, selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan bapak **Muh. Imran**, selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor baru Universitas Hasanuddin beserta jajarannya selamat atas masa baktinya, semoga kedepannya memberikan banyak kemajuan dalam sistem pendidikan Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr.Phil Sukri, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberikan ruang pada penulis

selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm)**, Bapak **Drs. A. Yakub, M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Umni Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, serta arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi seorang mahasiswa.
6. Kepada keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar kelas perkuliahan, dan telah

berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.

7. Kepada teman-teman Ilmu Politik 2018 yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
8. Kepada saudara saudariku Revolusi18 Terima kasih telah menjadi sudara yang sangat baik yang selalu membantu dan mendukung dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	2
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	3
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Teori Perilaku Pemilih.....	10
2.2 Konsep Money Politik .....	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Skema Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.2 Dasar dan Tipe Penelitian.....	30
3.2.1 Dasar Penelitian .....	30
3.2.2 Tipe Penelitian.....	31

3.3	Sumber Data dan Informan Penelitian .....	32
3.3.1	Data Primer.....	32
3.3.2	Data Sekunder.....	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5	Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....		38
4.1	Kota Makassar.....	38
4.1.1	Wilayah Administrasi Kota Makassar .....	38
4.1.2	Sosial Ekonomi Kota Makassar.....	39
4.1.3	Gambaran Umum Pemerintahan Kota Makassar.....	41
4.2	Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020.....	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		46
5.1	Bentuk Prkatik Money Politik di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020.....	46
5.1.1	Serangan Fajar.....	46
5.1.2	Pembagian Sembako .....	58
5.1.3	Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Umum .....	65
5.2	Penyebab Masyarakat Menerima <i>Money Politic</i> .....	72
5.2.1	Tradisi Menerima Serangan Fajar .....	73
5.2.2	Kondisi Ekonomi Pemilih .....	76
5.2.3	Tingkat Pendidikan Pemilih .....	80
BAB VI PENUTUP .....		85
6.1	Kesimpulan.....	85
6.2	Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA..... 87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara demokrasi dapat dilihat dari apakah negara tersebut melaksanakan pemilu. Pelaksanaan pemilu merupakan momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan politik.<sup>1</sup> Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih merupakan masyarakat di daerah.

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.

Pilkada di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu langsung dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal

---

<sup>1</sup> Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia ". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol. 1 No. 1. Mei 2012. Hal. 12.

maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil Kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih dan terahir pengesahan dan pelantikan.

Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilu. Kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi.

Seringkali terjadi pelanggaran dalam masa kampanye, salah satunya adalah Money Politics. Secara umum money politic diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut Sedangkan menurut Ismawan money politic diartikan

sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik demokratisasi atau pemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan tingkat desa.<sup>2</sup> Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Kegiatan money Politics yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan.

Larangan politik uang sudah diatur dalam Undang-Undang. sebagaimana dalam Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yakni “Setiap orang yang sengaja pada saat pemungutan suara dijanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pengaturan politik uang diatur lebih lanjut dalam Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, baik pada saat kampanye, masa tenang, maupun pada hari pemungutan suara berlangsung, praktik semacam ini juga dilarang dan dikenakan sanksi pidana dan juga denda. Walaupun

---

<sup>2</sup> Mohamad Amanu, Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), Hal. 7-8

adanya undang-undang yang akan menjerat bagi para pelaku dan penerima Money Politics namun tetap saja kejadian-kejadian Money Politics masih saja marak terjadi, hal ini disebabkan karena proses suap menyuap yang merupakan kesepakatan dari dua pihak baik dari kandidat atau tim maupun pemilih akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak saling berkerjasama dalam menutupi tindakan tersebut.

Praktek politik uang salah satunya pernah terjadi di kota Makassar/ Menjelang hari H pencoblosan banyaknya spanduk yang terpajang dengan terang-terangan menulis kata “Menerima Serangan Fajar” didepan rumah dan depan umum.<sup>3</sup> Ini artinya masyarakat kota Makassar sangat terpengaruh dengan praktek Money politik ini bahkan berdasarkan data dari petugas KPU ada masyarakat kota Makassar yang secara terang-terangan mengaku tidak ikut menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapatkan sogokan uang dari peserta pilkada.<sup>4</sup>

Pelanggaran juga terjadi di Sulawesi Barat, di mana saat terjadi Pemilihan Legislatif DPRD pada tahun 2019, salah satu calon DPRD tertangkap oleh Bawaslu sedang membagi-bagikan sebesar Rp200.000 kepada calon pemilih.<sup>5</sup> Bawaslu telah berupaya untuk terus mencari dan menemukan praktik politik uang agar proses pemilihan yang terjadi tetap

---

<sup>3</sup> <https://Manado.Tribunnews.Com/2019/04/22/Penampakan-Spanduk-Misterius-Dengan-Slogan-Kampung-Serangan-Fajar-Di-Makassar>. Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>4</sup><https://Sulsel.Idntimes.Com/News/Sulsel/Ashrawi-Muin/Kpu-Makassar-Ada-Pemilih-Urung-Ke-Tps-Karena-Tak-Dapat-Serangan-Fajar?Page=All>. Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>5</sup><https://Regional.Kompas.Com/Read/2019/04/15/08464111/Caleg-Partai-Golkar-Tertangkap-Tangan-Bagi-Bagi-Uang-Jelang-Pemilu?Page=All>. Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

berjalan sesuai asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika terjadi campur tangan politik uang dalam proses pemilihan aparat negara, berarti tidak terpenuhi asas rahasia karena pemilih telah diketahui akan memilih siapa. Asas jujur karena calon yang dipilih bukan berdasarkan pilihannya melainkan karena adanya politik uang yang terjadi dan asas adil karena politik uang adalah mencurangi calon kandidat yang lain dan hal ini tidak adil untuk dilakukan.

Kepedulian masyarakat akan pemberantasan money politik hingga hari ini tergolong cukup baik. Dilansir dari <https://www.bawaslu.go.id>. Diungkapkan oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku anggota dari Bawaslu menyatakan pada tahun 2020 dari 262 kasus politik uang yang ditangani Bawaslu, 197 darinya adalah laporan masyarakat<sup>6</sup>. Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat diharapkan mampu untuk memberantas praktik politik uang ini karena Bawaslu mungkin saja sedikit kesulitan dikarenakan kebanyakan pelaku dan penerima menutup mulut dan merahasiakan praktik ini. Sehingga dari lingkungan masyarakat harus ada yang menjadi *wistle blower*.

Pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 tidak terlepas dari praktik money politik. Praktik politik uang dalam pemilihan walikota adalah sebagai turunan dari praktik politik uang yang biasa terjadi pada kegiatan pemilu yang lebih besar. Seperti pemilihan gubernur, DPR dan lainnya. Dan pelaku

---

<sup>6</sup> Bawaslu. (2020). *Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat*. Diakses Dari: <https://www.bawaslu.go.id/>

praktik ini terdapat dua jenis aktor, aktor langsung yang mana pelakunya adalah calon aparat sendiri. Atau aktor tidak langsung yang pelakunya disebut sebagai tim sukses kandidat<sup>7</sup>. Adanya tim sukses dipertunjukkan sebagai pemasaran politik, pemasaran politik memang diperbolehkan selama itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari pelanggaran kampanye termasuk pelanggaran praktik politik uang.

Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Setelah kolom kosong memenangkan Pilwalkot kota Makassar tahun 2018 sehingga kepemimpinan kota Makassar di ambil alih oleh Pejabat (PJ) Walikota yang ditunjuk oleh Mendagri. Baru-lah di tahun 2020 kota Makassar kembali menggelar Pilwali yang diikuti oleh 4 pasang calon. Keempat paslon tersebut merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh besar di kota Makassar diantaranya paslon nomor 1 Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi (ADAMA) yang diusung dua parpol, Nasdem dan Gerindra. Danny merupakan mantan Walikota Makassar periode 2014-2019. Paslon nomor urut 2 Munafri Arifuddin dan Rahman Bando (Appi-Rahman) yang diusung oleh tiga parpol yaitu Demokrat, PPP, dan Perindo. Paslon nomor urut 3 Syamsu Rizal dan Fadli Ananda (DILAN) yang diusung oleh tiga parpol yaitu PDIP, Hanura dan PKB. Lalu Paslon yang terakhir nomor urut 4 Irman

---

<sup>7</sup> Halili. (2009). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora*, 14(2). Hal. 99.

Yasin Limpo dan Zunnun Nurdin (IMUN) yang diusung oleh tiga parpol, Golkar, PAN, dan PKS.

Terdapat dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon Mohammad Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi. Paslon tersebut dilaporkan oleh tim lawan karena tersebarnya sebuah video yang berisikan warga sedang membawa beras dengan gambar karungnya adalah Paslon Mohammad Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi sehingga hal ini diduga sebagai *money politic*. Meskipun begitu Paslon Mohammad Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi dikatakan tetap ikut kampanye tanpa terganggu dengan tuduhan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Manggala. Kecamatan Manggala adalah kecamatan yang terletak di Makassar dengan luas wilayah 24,14km<sup>2</sup>. Alasan pemilihan kecamatan Manggala, dikarenakan pada tahun 2012 lampau pernah ada laporan dari Ahmad Effendi selaku ketua RW 02 Kelurahan Blorong Kecamatan Manggala terkait kasus politik uang yang dilakukan paslon saat itu yaitu Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu'mang.<sup>8</sup> Data diatas diperkuat dengan laporan Bawaslu pada tahun 2019 yang menyampaikan bahwa kecamatan Manggala Merupakan salah satu kecamatan yang memiliki tingkat praktek money politic yang cukup tinggi.<sup>9</sup> Pelaporan ini mengindikasikan bahwa kecamatan Manggala juga menjadi

---

<sup>8</sup> <https://Koran.Tempo.Co/Read/Makassar/294850/Panwaslu-Kaji-Dugaan-Politik-Uang-Di-Borong> Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>9</sup> <https://Politik.Djournalist.Com/2019/04/13/Temukan-Caleg-Lakukan-Money-Politik-Ini-Tps-Rawan-Di-Pemilu-2019-Versi-Bawaslu-Makassar/>. Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

sasaran dari politik uang dan bukan sebuah ketidakmungkinan jika pada tahun 2020 terjadi kembali menjadi sasaran politik uang.

Sehingga penelitian menunjukkan data yang bersumber dari warga kecamatan Manggala dan juga tim sukses dari peserta pemilihan walikota Makassar 2020 yang bertugas untuk memenangkan pasangan calon di kecamatan Manggala. Dari uraian latar belakang yang telah dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut terkait ***“Politik Uang Dalam Pemilihan Walikota Makassar di Kecamatan Manggala Tahun 2020”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam pemilihan Walikota Makassar di kecamatan Manggala pada tahun 2020 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam pemilihan Walikota Makassar di kecamatan Manggala pada tahun 2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dilakukan ditinjau dari manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat akademis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang digunakan untuk media pembelajaran.
- b. Diharapkan bahwa penelitian bermanfaat berupa memberikan ide kepala peneliti selanjutnya untuk mengkaji topik yang serupa dalam kata lain bahwa penelitian ini bermanfaat sebagai acuan maupun referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai literasi terkait kajian politik uang yang sering terjadi saat kegiatan pemilu.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk menuntaskan pendidikan sarjana dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan aspek-aspek teoritis yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Konsep-konsep yang dipaparkan dalam bab ini berkaitan dengan pokok bahasan dan hasil penelitian, yang mana juga diterapkan guna membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

#### **2.1 Teori Perilaku Pemilih.**

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu ; Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan. Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial ), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan

terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan<sup>10</sup>.

Mazhab Michigan menerangkan bahwa perilaku pemilih sangat bergantung pada sosialisasi politik lingkungan yang menyelimuti diri pemilih. Dimana pilihan seorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik ini tidak jarang memilih partai yang sama dengan pilihan orang tuanya. Bahkan, kecenderungan menguatkan keyakinan terhadap suatu partai akibat sosialisasi ini merupakan dampak dari padanya. Untuk kasus terhadap anak-anak, menurut jaros dan grant (1974), identifikasi kepartaian lebih banyak disebabkan pengimitasian sikap dan perilaku anak atas sikap kedua orang tuanya.<sup>11</sup>

Breenan dan lomsky (1977) serta Fiorina (1976) menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku “ekpresif”. Perilaku ini tidak jauh dengan perilaku Supporter yang memberikan dukungannya pada tim yang mereka dukung. Menurut mereka, perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi. Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka

---

<sup>10</sup> Andi Akbar. (2016). Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba ( Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa). *Skripsi: Uin Alauddin Makassar*. Hal. 25.

<sup>11</sup> Edy Kusmayadi, “Prilaku Pemilih”. Official Website Of Edy Kusmayadi. [Http://Edikusmayadi.Blogspot.Com/2011/04/Perilaku-Politikpemilih.Html](http://Edikusmayadi.Blogspot.Com/2011/04/Perilaku-Politikpemilih.Html). Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

menganggap bahwa suatu partai politik tidak loyal serta tak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Melimpahnya informasi dan pesan politik menjelang kampanye pemilihan umum menyulitkan pemilih untuk mengolah dan menganalisisnya. Disamping itu, informasi yang tersedia sering sekali bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini bisa diakibatkan oleh teknik manipulasi politik untuk menyudutkan lawan politik, janji-janji politik, penggunaan konsep dan bahasa yang rumit serta pesan propaganda di satu sisi, sedangkan di sisi lain para pemilihnya mengidap keterbatasan kognitif (Bounded Rational). Konsep ini melihat bahwa si pengambil keputusan memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas memproses informasi, mengingat kejadian masa lalu dan keterbatasan kemampuan kalkulasi.

Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik mengatakan bahwa perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode<sup>12</sup>. Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya.

---

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, Hal. 130.

Lomasky di dalam analisis Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih yang terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja<sup>13</sup>. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang demikian rupanya hampir sama dengan perilaku dukungan suporter. Inilah yang menjadi permasalahan ketika banyaknya pemilih yang cenderung perilaku politiknya termanifestasi pada satu poin tertentu, bisa itu karena adanya suatu keterkaitan si pemilih dengan si calon atau kandidat. Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu<sup>14</sup>:

### **1. Pendekatan Sosiologis.**

Istilah “Pendekatan” merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris, *approach*. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 106.

<sup>14</sup> Asfar. (2004). *Pemilu Dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Utama, Hal. 137

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal ini kajian sosiologi antropologi.

Sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Sosiologi dan antropologi saling menunjang dari segi teori maupun konsepnya. Konsentrasi sosiologi pada masyarakatnya, sedangkan konsentrasi antropologi pada kebudayaannya. Antara keduanya jelas-jelas tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat dalam kelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Antropologi berusaha masyarakat melalui kebudayaan, semua unsur kebudayaan adalah kelompok manusia sebagai satu-satunya jenis makhluk yang memiliki potensi budaya, agama, mempunyai keyakinan dan pengetahuan untuk menerima ajaran.

Pendekatan sosiologi cenderung menempatkan kegiatan memilih dengan mengaitkan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin tempat tinggal (kota ataupun desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan atau agama. Pomper (dalam political explore 2012) mengatakan bahwa adanya hubungan antara predisposisi sosial ekonomi pemilih dan

keluarga dalam kaitannya dengan perilaku pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya preferensi-politik keluarga, apakah preferensi politik pilihan ayah atau preferensi pilihan ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya.<sup>15</sup>

## **2. Pendekatan Psikologis.**

Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa tingkah laku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Pendekatan Psikologi sosial juga bisa menjelaskan bagaimana sikap (*attitude*) dan harapan (*expectation*) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial (*conformity*). Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum adalah berupa identifikasi partai.

Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atau partai – partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Dalam hal pendekatan psikologis, seperti namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep

---

<sup>15</sup> Efriza. *Political Explore*. (Bandung: Alfabeta) Hal. 494

psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai dalam mempengaruhi pemilih.

Misalnya sistem kepercayaan, agama, dan pengalaman hidup seseorang. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa tingkah laku individu akan membentuk norma kepercayaan individu tersebut. Pendekatan psikologi lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, dari pada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat (walikota atau parlemen) karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Oleh karena itu, bagi Mark N. Franklin; *“sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih ”*

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis, menurut Richard Rose dan Ian

Mc. Alliser, menekankan pada tiga aspek psikologi sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu parpol, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Bagi pendekatan psikologis, faktor sikap merupakan sikap yang penting. Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan. Penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri.

Seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, identifikasi dan idealisasi. Dalam pendekatan psikologis, kajian perilaku memilih memusatkan perhatiannya pada tiga hal pokok yaitu, persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat, persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat, dan identifikasi partai.<sup>16</sup>

### **3. Pendekatan Rasional.**

Menurut perspektif Pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 504-505

kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Yang dilihat bukanlah ongkos memilih, melainkan suara yang terkumpul dapat memengaruhi hasilnya. Hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang mencalonkan diri dalam pemilu. Bagi masyarakat banyak yang perhitungan untung rugi berkaitan dengan partai apa yang akan dipilih dan termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau tidak memilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan self-interest.<sup>17</sup>

Pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di Indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Kedua, kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor

---

<sup>17</sup> Skripsi. Rubiyanti Rika. Pengaruh Popularitas Terhadap Pilihan Pemilih Pemula (Fenomena Masuknya Artis Dalam Politik) (Fisip\_ Universitas Sumatra. 2009).

wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye agar pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Ketiga adalah pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penjelasan sebelumnya yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional. Pendekatan sosiologi sendiri lebih menekankan akan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrument kemasyarakatan seseorang, seperti status sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas. Pendekatan sosiologis juga melihat yang berkaitan dengan hal agama, etnik dan wilayah tempat tinggal dan domisili.

Namun pendekatan wilayah tempat tinggal sering di kombinasikan dengan pendekatan psikologis emosional, sebagai contohnya ada seorang sosok calon walikota yang dikenal baik oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Kemungkinan besar para pemilih akan menggunakan pendekatan sosiologis dan psikologis sehingga memilih calon walikota sebab pemilih telah mengenal sosok tersebut dan mengabaikan

pertimbangan lainnya yang kemungkinan muncul setelah pemilihan berakhir. Pendekatan psikologis sendiri sangat bergantung dengan sosialisasi politik lingkungan tempat pemilih berdomisili. Sosialisasi politik yang berkembang yang akan mengarahkan kecenderungan emosional pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Semua ini termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan kampanye yang menimbulkan pencitraan politik terhadap kandidat. Untuk konteks pendekatan rasional, pada saat seorang pemilih merasa tidak mendapat faedah dengan memilih salah satu partai atau kandidat calon walikota dalam pemilihan walikota, ia tidak akan memberikan pilihannya dan kasus ini berlaku juga bagi pemilih yang tidak mau tahu atau pemilih apatis. Gambaran ketiga pendekatan tersebut seperti yang ada pada sub bab sebelumnya.

## **2.2 Konsep Money Politik**

Politik Uang atau *Money Politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual- beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan

imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan<sup>18</sup>.

Politik uang dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa jadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu pemilih kepala desa hingga pemilihan umum suatu Negara.

Maka politik Uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan Uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari kepada pihak-pihak tertentu<sup>19</sup>.

Modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan antara lain:

1. Sarana kampanye. Meminta dukungan dari masyarakat penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung di beri uang transport dengan harga yang beragam.
2. Dalam pemilu ada tindakan praktik *money politic* Misalnya: Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada kader partai,

---

<sup>18</sup> Thahjo Kumolo. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: Pt Mizan Publika, Hal. 155.

<sup>19</sup> Masdar. (2020). *Praktek Money Politik Dalam Pemilu Di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam. Skripsi: Iain Palopo*. Hal. 16.

penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirim proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus memberikan suaranya

3. Sedangkan yang termasuk dari bentuk *money politic* dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan pasilitas umum, seperti pembangunan Mesjid, Mushalla, Madrasah, dan Jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya

Faktor-faktor terjadinya politik uang menurut Masdar (2020) sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Masyarakat yang kurang cerdas

Orang-orang yang kurang cerdas lebih mudah di tokoh-tokohi. Itulah mengapa, pelaksanaan politik Uang lebih ditekankan kepada orang-orang yang berpendidikannya terbelakang yang hidup di dusun-dusun dan kampung yang terpencil. Masyarakat desa yang belum melek teknologi merupakan sasaran empuk dari kampanye hitam sebab mereka lebih mudah di provokasi dan di sogok.

2. Kemiskinan atau rendahnya kesejahteraan

Hakikatnya seperti itu. Siapapun yang merasa hidupnya serba kekurangan, atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi karena kendala ekonomi yang buruk, pasti gampang dirayu dengan embel-embel Uang. Mereka akan dengan mudah menjual hak pilih kepada

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 18.

calon yang menyuapnya, walaupun jumlah yang diberikan tdk seberapa.

### 3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang di timbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak mengenal calon, bahkan tidak ikut pemilupun tidak masalah .

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politic, sebagai berikut<sup>21</sup>:

#### 1. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

---

<sup>21</sup> Dedi Irawan. (2015). Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

## 2. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Kemudian menurut Subekhan (2018) dan Holish (2018) bentuk – bentuk politik yang biasa dilakukan sebagai berikut:

### 1. Berbentuk uang

Uang adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver Individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memeaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang. Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang

digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang yang merupakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan tersebut<sup>22</sup>

## 2. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dari bentuk *money politic* adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum,

---

<sup>22</sup> Muhammad Subekhan. (2018). Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3)

seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya<sup>23</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak disebutkan dengan jelas apa saja bentuk dari politik uang. Hanya disebutkan bahwa politik uang adalah berupa uang dan materi lainnya yang diberikan kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Larangan untuk melakukan praktik politik uang ini tercantum dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (undang-undang pemilu), dalam Pasal 523 menyatakan

- (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dlm pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”.
- (2) “Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih

---

<sup>23</sup> Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin. (2018). Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2).

secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)".

- (3) "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)".

Dalam Pemilihan Umum ketentuan larangan dan sanksi pidana terhadap praktik politik uang dibedakan menjadi 3 kategori peristiwa politik uang berdasarkan waktu kejadian yaitu peristiwa politik uang yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, pada saat kampanye dan pada masa tenang. Lamanya ancaman sanksi pidana penjara dan denda yaitu berkisar antara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta sampai dengan paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Sedangkan pihak yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda adalah pihak pemberi.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam pemilihan pemimpin termasuk pemilihan walikota, ada saja kandidat yang melakukan praktik politik uang. Praktik ini bukan hanya dilakukan oleh kandidat yang baru untuk meraih kepercayaan masyarakat.

Namun juga dilakukan oleh kandidat yang maju sebelumnya atau bahkan yang menjabat sebelumnya agar dapat kembali memenangkan pemilihan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku pemili sebagai pisau analisis dalam melihat bagaimana money politik berdampak kepada perilaku atau pilihan akhir dari seseorang. Sebagai bagian dari konteks permasalahan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan konsepsi money politik untuk memperjelas batasan dan bentuk apa saja yang dapat dikatakan money politic. Pisau analisis ini dapat menjawab rumusan masalah menyangkut bagaimana penggunaan money politik pada peserta Pilwali Kota Makassar tahun 2020 khususnya di kecamatan Manggala yang menjadi fokus lokasi penelitian ini.

Praktik politik uang yang dilakukan ini adalah bentuk tindakan yaitu agen melakukan praktik politik uang dengan tujuan untuk membeli suara masyarakat sehingga dapat memenangkan pemilihan yang akan berlangsung. Sebelumnya disebutkan bahwa bentuk politik uang bukan hanya berupa uang saja. Tapi juga fasilitas umum seperti membangun fasilitas umum untuk masyarakat. Fasilitas ini biasanya juga mengarah ke golongan tertentu, misalnya membangun masjid untuk golongan masyarakat beragama islam. Contoh praktik politik uang dengan fasilitas umum adalah proses membentuk citra pemimpin yang peduli dan satu visi terhadap golongan tertentu.

Dengan politik uang tersebut akhirnya dapat mengubah perilaku dari pemilih. Masyarakat akan memilih yang mana disukai dan menurutnya

cocok dengan dirinya. Dan hal ini berdasarkan dari politik uang dengan bentuk uang di mana hal ini adalah suap. Atau berdasarkan politik uang dengan bentuk fasilitas umum yang di mana ini bentuk dari pencitraan yang dilakukan oleh calon penguasa. Jika strategi politik uang yang dilakukan berhasil, maka kandidat yang bersangkutan akan memenangkan pemilu seperti yang diharapkannya.

#### 2.4 Skema Pikir

